

NASIONALISME ETNIK DI KALIMANTAN BARAT

Kristianus

Universitas Kebangsaan Malaysia

ABSTRACT

Nowadays ethnical celebration triggered by the uncontrollable identity politics, is happening in Indonesia. In West Kalimantan, for instance, a struggle for the identity politics has succeeded in forming new governments in district levels. The new district governments are always based on the dominant ethnic groups in the area. The political impact of the identity politics can whip up the ethnical spirit by giving hegemony to ethnic minority in the area. This paper argues that this phenomenon could become “ethnic nationalism”. Theoretically, identity politics is a struggle of a group or marginal people (periphery) politically, socially as well as culturally and economically. Various ethnic conflicts in West Kalimantan relate to the identity politics and the resistance towards the hegemony of the ruling ethnic elite. The paper concludes that the ethnic conflicts in West Kalimantan are the forms of effort of an ethnic group to show their existence. These people have been threatened, or for a long time they have been marginalized systematically, so that their spirit to fight against hegemony rise. Identity politics appearing in the forms of cultural institution such as ethnic customary council could be explained as the ethnic systematic efforts to strengthen their identity, which eventually could become a prospective “ethnic nationalism”.

Key words : Politics, identity, conflicts, nationalism, ethnic, hegemony.

PENDAHULUAN

Orde Reformasi dan Otonomi Daerah yang dilaksanakan sejak 1999 telah memunculkan kembali masalah identitas etnik di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Barat. Identitas etnik menjadi perdebatan publik karena isu ini bersentuhan langsung dengan politik kekuasaan.

Di Provinsi Kalimantan Barat identitas etnik bahkan telah menjadi acuan dalam merubah administrasi pemerintahan. Sampai akhir pemerintahan rezim Orde Baru tahun 1998, provinsi ini hanya terdiri dari 7 kabupaten/ kota. Sepuluh tahun kemudian yaitu tahun 2011

jumlah kabupaten/kota telah menjadi 14 kabupaten/kota. Peningkatan ini sangat signifikan, yakni 100 %.

Sekarang ini terjadi diskusi publik tentang pembentukan Provinsi Baru di Kalimantan Barat. Kelak provinsi ini akan dinamakan Provinsi Kapuas Raya, wilayah provinsi Kapuas Raya ini meliputi kabupaten-kabupaten di pedalaman seperti Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu yang nota bene kawasan yang didominasi oleh Etnik Dayak.

Beberapa kelompok etnik sekarang telah memiliki wilayah kekuasaan (teritori) tersendiri, misalnya Kabupaten Sambas menjadi teritori Melayu Sambas dan Kabupaten Pontianak menjadi teritori Melayu Mempawah, Bengkayang menjadi teritori Dayak Bekati, Landak menjadi teritori Dayak Kanayatan, Sekadau menjadi teritori Dayak Mualang, Melawi menjadi teritori Dayak Keninjal dan Melayu Pinoh, Kayong Utara menjadi teritori Melayu Kayong.

Adapun di Kawasan kabupaten seperti Sintang sedang berlangsung perjuangan Dayak Ketungau untuk membentuk kabupaten sendiri. Di kabupaten Kapuas Hulu Dayak Iban, Taman, Kantu dan Suhaid sedang berlomba-lomba pula memekarkan kabupaten baru. Di Kabupaten Ketapang saat ini sedang berlangsung perjuangan Dayak Simpang dan Dayak Keriau untuk mendirikan kabupaten baru. Di kabupaten Sanggau sedang berlangsung perjuangan Dayak Bidayuh dan Dayak Tayan untuk mendirikan kabupaten baru.

Sementara itu, etnik Cina dan Madura yang terusir akibat konflik-konflik yang melibatkan mereka, terkonsentrasi di sekitar perkotaan. Bersama Bugis dan Jawa, keempat kelompok etnik tersebut menjadi mayoritas di beberapa lokasi kota perdagangan penting di Kalimantan Barat seperti Kubu Raya, Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Adapun Singkawang telah menjadi teritori Cina, bukan hanya dari aspek demografis, melainkan juga simbolis.

TINJAUAN TEORITIS

Nasionalisme etnik diartikan sebagai sentimen dari anggota-anggota suatu *ethnonation* yang dimobilisasi untuk memperjuangkan kedaulatan bagi komunitas etnis mereka (Tambunan 2004: 40),

sementara *ethnonation* diartikan sebagai sebagai komunitas orang yang memaknakan identitas politik mereka dengan mengklaim hak untuk menjalankan kedaulatan.

Adapun politik identitas menurut Lukmantoro (2008) dalam Bakran Suni (2010: 40) adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Kemunculan politik identitas merupakan respon terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang seringkali diterapkan secara tidak adil. Lebih lanjut dikatakannya bahwa secara konkrit, kehadiran politik identitas sengaja dijalankan kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami marginalisasi. Hak-hak politik serta kebebasan untuk berkeyakinan mereka selama ini mendapat hambatan yang sangat signifikan.

Politik identitas ini terkait dengan upaya-upaya mulai sekedar penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin awal dari upaya memasukkan nilai-nilai tertentu ke dalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan, politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota/kabupaten identik dengan agama tertentu.

Secara teoritis munculnya politik identitas merupakan fenomena yang disebabkan oleh banyaknya faktor seperti : aspek struktural berupa disparitas ekonomi masa lalu dan juga masih berlanjutnya kesulitan ekonomi saat ini yang telah memberikan alasan pembenaran upaya pemisahan diri sebuah kelompok primordial yang bertautan dengan aspek keterwakilan politik dan institusional.

Dalam konteks keterwakilan politik, belum meluas dan melembaganya partisipasi dan keterwakilan politik masyarakat secara komprehensif telah memicu munculnya kebijakan yang diskriminatif dan eksklusif yang pada akhirnya memperkuat alasan kebangkitan politik identitas.

Teori Hegemoni

Peneropongan mengenai munculnya semacam “negara etnik” di Kalimantan Barat ini didekati dengan menggunakan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci. Pilihan teori ini karena “negara etnik” sebagaimana judul makalah ini sebenarnya adalah hegemoni etnik yang dilakukan oleh elit etnik yang berkuasa di Kalimantan Barat. Antonio Gramsci adalah seorang pemikir Neo-Marxis kelahiran Ales, Sardinia, Italia pada 22 Januari 1891 dan meninggal di Roma, 27 April 1937. Gramsci dikenal melalui terjemahan dari kumpulan catatannya ketika beliau di penjara, yang kemudian dibukukan dengan judul “Quqreni del Carcere atau Selection from the Prison Notebooks” (1927-1937) yang merupakan buku harian yang ditulis dipenjara antara tahun 1929 dan 1935. Dari buku inilah berbagai macam pemikiran Gramsci dikenal. Di antaranya adalah pemikirannya tentang intelektual organik, kritiknya terhadap pendidikan politik indoktrinasi dan pendidikan sebagai penindasan, yang kemudian mendorongnya menjadi polopor pemikiran *popular education* dan *participatory training* yang menekankan pada kesadaran kriti. (Bakran Suni 2007: 45). Pemikiran Gramsci juga berkisar pada sejarah Italia yang kemudian memunculkan konsep tentang *subaltern*, mereka yang bukan dominan/kelompok inferior dalam sejarah negara Italia. (Gramsci, 1971).

Dalam konteks makalah ini akan diuraikan lebih detil tentang konsep hegemoni dari Gramsci untuk menganalisis pergolakan *subaltern* “korban” kekerasan politik. Teori hegemoni Gramsci dibangun atas dasar premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik di mana agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa. Lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsensual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukkan hegemoni sebagai satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang ia namakan “dominasi”, yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik.

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di

bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Teori hegemoni Gramsci mensyaratkan penggunaan kekuatan koersif negara hanya sebagai pilihan terakhir ketika “kesadaran spontan menemui kegagalannya”. Lebih jauh hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan kelompok berkuasa mengandalkan kekuasaan koersif negara untuk menjaga kekuasaannya, hanya menunjukkan kelemahan ideologis maupun kulturalnya daripada keperkasaannya. Sebuah hubungan hegemonik ditegakkan ketika kelompok subordinat menerima ide-ide dan kepentingan politik kelompok berkuasa seperti layaknya punya mereka sendiri. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan kelompok berkuasa tidak ditentang karena ideologi, kultur, nilai-nilai, norma, dan politiknya sudah diinternalisasi sebagai kepunyaan sendiri oleh kelompok subordinat.

Dalam bahasa lain, hegemoni tidak pernah diperoleh begitu saja tetapi harus selalu diperjuangkan. Hal ini jelas menuntut kegigihan yang luar biasa dari kelas yang berkuasa untuk mempertahankan dan memperkuat otoritas sosial dalam berbagai kekuatan sosial. Apabila suatu saat terjadi peristiwa di mana hegemoni kelas yang berkuasa mengalami krisis dan situasi ini tidak segera dibenahi, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah bahwa kekuatan kelas yang melawan akan mengambil alih. Namun, seandainya pada saat krisis itu terjadi, pertentangan terlalu hebat antarkekuatan sosial, kelas sosial terpisah dari partai-partai dan bentuk organisasi serta orang-orang yang memimpin organisasi itu tidak lagi diakui oleh kelas (fraksi) mereka sebagai wakil sehingga terjadi peristiwa yang dinamakan sebagai krisis perwakilan. Situasi seperti ini amat berbahaya karena terbuka kemungkinan munculnya pemecahan masalah melalui kekerasan atau munculnya aktivitas dari kekuatan yang tidak dikenal yang diwakili oleh orang-orang yang kharismatik.

KONFLIK ETNIK SEBAGAI MODEL

Di Kalimantan Barat, konflik yang bernuansa Suku-Agama-Ras (SARA), lebih-lebih menyangkut hubungan antarsuku bangsa, bukan hal baru. Jejaknya biasa dirunut sejak tahun 1967, saat terjadi anti Tionghoa di kawasan ini. Bahkan lebih jauh lagi, pada 1770-1854, yakni konflik antarwarga Tionghoa, Melayu dan Dayak (Siahaan, 1994:1).

Pengamatan cermat menunjukkan, sejak saat itu di wilayah ini secara historis banyak diwarnai oleh aksi dan konflik rasial¹. Warna-warna tadi tampak menjadi gejala, yang selalu berulang dengan interval waktu lebih pendek. Pemicu konflik sebenarnya acapkali sepele, misalnya menyabit rumput di tanah orang lain (kasus 1997), perkelahian kecil (1982), soal mengganggu istri orang (1992) atau hanya karena persenggolan (1994), perebutan perempuan (1996) dan penagihan hutang (1999). Namun, persoalan sepele itu kemudian meluas ke wilayah rawan, hingga menimbulkan kejengkelan, khususnya antara suku-suku Dayak dan Madura, dan lainnya antara suku Melayu dan suku Madura. (Kristianus 2009: 33)

Konflik terakhir terjadi antara suku-suku Melayu dan Madura terjadi pada Februari-April 1999 dan oktober 2000 yang tidak sedikit menimbulkan korban jiwa dan benda di kedua belah pihak. Dampaknya bahkan sampai hari ini orang Madura belum bisa kembali ke Kabupaten Sambas.

Pada masa sebelum dan selama masa kolonial, Kalimantan Barat terpecah-belah dalam peperangan antarsuku Dayak atau populer disebut 'Kayau'. Ketika itu orang Dayak baru mengenal politik yang sangat terbatas, mereka hanya berpikir untuk menghabisi orang lain yang masuk dan mencari hasil hutan di wilayah mereka karena dianggap musuh. Atas prakarsa Kolonial Belanda, orang Dayak kemudian berhasil menciptakan perdamaian di antara mereka pada kongres di Tumbang Anoi tahun 1894. Marko Mahin (2007:1) menjelaskan hal ini sebagai berikut :

Oorlog voeren makkeijker is dan vrede sluiten.
Berperang jauh lebih mudah dari berdamai. Tanpa pernah tahu akan pepatah tua Belanda itu, pada tanggal 22 Mei hingga 24 Juli 1894, para panglima perang, kepala adat dan kepala suku Dayak berkumpul di Tumbang

¹ Hingga saat ini setidaknya ada 3,397 kali kekerasan etnik yang pecah di Kalimantan Barat sejak tahun 1992 dengan kecenderungan kenaikan dan segi frekuensi, korban dan keluasan area konflik. Penelaahan oleh seorang sosiolog, Dr Iqbal Djajadi, 2003 menunjukkan bahwa umumnya kekerasan etnik sejak tahun 1930 tersebut berawal dari tindak pidana inter-etnik, yakni seorang atau beberapa orang anggota suatu kelompok etnik yang melakukan penganiayaan dan/atau pembunuhan terhadap seseorang atau beberapa orang yang merupakan anggota kelompok etnik lain.

Anoi. Dusun kecil di hulu sungai Kahayan itu menjadi saksi sejarah bagaimana orang-orang yang selama ini bertikai, bertemu untuk membicarakan perdamaian. Rapat 34 hari itu berhasil menciptakan era baru di bumi Kalimantan. Peradaban yang tanpa peperangan dan pemenggalan kepala telah lahir. Kesepakatan bersama pun diambil yaitu: menghentikan kebiasaan perang antarsuku (*asang*) dan pemenggalan kepala (*hakayau*). Menghentikan kebiasaan balas dendam (*habaleh-bunu*). Sejak itu tidak ada lagi korban kepala manusia dan perbudakan. Denda adat (*jipen*) yang dulunya dalam rupa manusia diganti dengan uang. Hukum adat diberlakukan sebagai sistem peradilan suku. Bagi mereka yang haus akan ceritera eksotik yang bertemakan *headhunters*, *kopffäger* atau *koppensneller*, *Toembang Anoi* 1894 merupakan antiklimaksnya.

Ketika Kolonial Belanda tiba di Kalimantan Barat, daerah ini sudah merupakan daerah yang terdiri dari banyak kesultanan. Kendati saling bersaing, semua sultan adalah Melayu atau Dayak yang sudah menjadi Islam (Thambun Anyang 1998: 11) dan memperoleh dukungan dari pemerintah Belanda dan Jepang. Dayak yang kemudian menjadi rakyat biasa menjadi subyek kekuasaan Melayu. Cina merupakan kelompok etnik yang walaupun berada dalam kekuasaan Melayu (Tambun Anyang 1998: 9)², namun mereka berusaha mengembangkan otonomi tersendiri dan relatif eksklusif.

Konfigurasi sosial semacam itu terus bertahan hingga beberapa peristiwa penting terjadi di penghujung masa kolonialisme dan masa kemerdekaan. Pemerintah Belanda dan misionaris memberikan

² Menurut cerita yang dituturkan dari generasi ke generasi hal ini disebabkan orang-orang Dayak diperangi oleh Melayu dan sering kalah karena tidak mempunyai meriam dan senapan. Banyak yang dijadikan budak, "turun melayu" artinya masuk Islam dan ada pula yang dikawinkan dengan anak raja, kemudian diangkat menjadi raja dan sementara itu pergi ke kampung-kampung mengajak orang Dayak lainnya dalam kapasitasnya sebagai raja untuk juga "turun Melayu".

kesempatan pendidikan yang besar (Jammie Davidson 2002: 3)³, dan secara sadar atau tidak, ikut membentuk identitas etnik Dayak (Jammie Davidson (2003: 3)⁴.

SEJARAH PERPECAHAN

Mengenai penduduk asli Borneo ada baiknya kita perhatikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Museum Sarawak. Dilaporkan bahwa komunitas pertama yang mendiami Pulau Borneo ini adalah manusia di Gua Niah yang telah hidup sejak 50.000 tahun sebelum Masehi. Gua Niah merupakan satu kawasan studi arkeologi yang penting di wilayah Serawak, Malaysia Timur, dan juga di Asia Tenggara, terletak di sekitar 110 km di selatan kota Miri. Gua ini telah diteliti oleh Museum Sarawak mulai tahun 1954. Banyak peninggalan purbakala yang ditemukan di dalam gua ini yang mengisyaratkan pernah dihuni oleh manusia antara 50.000 – 40.000 tahun Sebelum Masehi.

Jadi, jika kita mencermati uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa penduduk asli Borneo sesungguhnya berasal dari ras yang sama. Ras Melayu bukan hanya mendiami Borneo tetapi kepulauan Nusantara. Oleh sebab itu ras Melayu meliputi seluruh suku bangsa yang ada di Nusantara. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, ketika persoalan politik dikaitkan dengan identitas, sebutan ras Melayu tidak bergaung. Terminologi Melayu kemudian dikaitkan dengan Islam. Menurut Anwar Din (2008:13-15),

³ Di Kalimantan Barat – seperti yang dipahami kemudian—gereja berperan dalam pembentukan bahan dasar dan utama bagi misi pembudayaan, terfokus meskipun tidak secara eksklusif, pada masyarakat non Muslim Kapuas. Dimana, seperti yang disadari, masyarakatnya masih kurang terpengaruhi oleh Islam dan cenderung belum tertekan oleh aturan Melayu. Secara paradoksal, tentunya, aturan tidak langsung telah menyelubungi kerajaan menekankan kapasitas pada tempat pertama. Selanjutnya, misionaris menggunakan kesempatan dengan memperhatikan segala kesempatan untuk membudayakan dan kristenisasi masyarakat hulu Kapuas. Pada 1890 sebuah stasi kecil dibuka di Semitau (Kabupaten Kapuas Hulu), dimana kemudian segera diikuti dengan pendirian kombinasi gereja-sekolah di dekat Sejiram. Dukungan kelembagaan yang minim menuntut ketabahan pada tahap awal ini. Baru pada 1905 dimana Kongregasi Capuchin memperoleh penugasan resmi dari Pusat Gereja Katolik di Roma dengan bantuan akses eksklusif ke Kalimantan Barat, barulah upaya misionaris menjadi lebih memperoleh momentum.

⁴ Sebagai kelanjutan dari kebijakan tidak langsung, terdapat dua pemaknaan lebih lanjut oleh para kolonial, termasuk pula Brook, yang menghasilkan identitas Dayak yang monolitik. Pertama melalui peperangan atau sebaliknya melalui penciptaan perdamaian. Di Kalimantan Barat, pengenalan aturan Belanda dan perubahan mendasar dari status hubungan antara pembuat aturan yang terkena aturan memancing kerusuhan-kerusuhan kecil yang tiba-tiba. Dalam studinya di daerah perbatasan Indonesia pada akhir abad ke-19, Tagliacozzo mencatat bahawa "Belanda tidak terlihat memahami bahwa kebijakan yang dibuatnya nyata-nyata membuat banyak kekerasan yang berlangsung. Masyarakat dipaksa hidup di bawah aturan baru dan di bawah kondisi dan keadaan yang dibuat oleh pemerintah kolonial di mana secara natural akan melahirkan perlawanan pada perkembangan matrik kekuasaan.

Orang Melayu terbentuk dari berbagai etnik. Sebagiannya terdiri dari masyarakat di Semenanjung Tanah Melayu, yaitu orang Kelantan, orang Terengganu, orang Kedah, orang Pahang, orang Johor, orang Perak dan orang Melaka. Sebagian lagi berasal dari keturunan Jawa, Sunda, Bugis-Makasar, Minangkabau, Banjar, Mandailing, Krinci, Riau, Boyan, Aceh dan Jambi. Selain itu, terdapat komunitas-komunitas lain seperti orang Arab, India, Siam, Cina, dan Eropa beragama Islam yang menjadi Melayu. Dasar penyatuan Melayu adalah agama Islam dan bahasa Melayu.

Selanjutnya Anwar Din mengatakan, Stamford Raffles begitu cemburu dengan Islam, namun beliau mengakui sumbangan Islam dalam pembentukan orang Melayu. Menurut Raffles:

“The most obvious and natural theory on the Malay origin is that they did not exist as a separate and distinct nation until the arrival of the Arabians in the Eastern Seas. At the present day they seem to differ from the more original nations, from which they sPemilung in about the same degree, as the Chuliahs of Kiling differ from Tamil and Telinga nations on the Coromandel coast, or the Mapillas of Malabar differ from the Nairs, both which people appear in like manner with the Malays, to have been gradually formed as nations, and separated from their original stock by the admixture of Arabian blood, and the introduction of the Arabic language and Moslem religion”.

Menurut Shamsul, AB (dalam Yusuf Ismail dan Rahimah, 2000: 194-195), Stamford Raffles adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep *the Malay nation, the Malay race*. Di dalam bukunya *“On the Malayu nation, with a Translation of its Maritime Institutions”* yang diterbitkan dalam jurnal *Asiatic Researcher* yang terbit di Calcuta pada tahun 1816, konsep bangsa Melayu berdasarkan bahasa. Konsepsi Raffles secara epistemologis dipengaruhi oleh pendekatan Johann Herder (1744-1803) seorang pemikir Jerman yang memperkenalkan konsep ‘bahasa jiwa bangsa’. Konsep ‘bangsa Melayu’ menurut Raffles ini sebagai berikut:

“... I cannot but consider the Malayu nation as one people, speaking one language, though spread over so wide a space, and preserving their character and customs, in all the maritime states lying between the Sulu Seas and the Southern Oceans, and bounded longitudinally by Sumatra and the western side of Papua or New Guinea”
(Raffles 1816: 103).

Dapat kita katakan dari uraian tersebut bahwa Raffles telah mempunyai gambaran yang jelas tentang ‘batas wilayah’ kawasan penempatan ras Melayu, yang kemudian kita kenal sebagai ‘alam Melayu’, ‘Dunia Melayu’, atau ‘Nusantara’.

Selain dari konsep bahasa, Raffles juga menambahkan dengan memasukan konsep sejarah untuk ras Melayu. Kosepnya itu adalah Salalatus-Salatin (Peraturan segala Raja-raja) sebagai sejarah Melayu. Selengkapnya Syamsul AB dalam Yusuf Ismail dan Rahimah (2000: 194-195) mengatakan:

“Dapat kita katakan bahwa Raffles, sebagai ahli perintis, telah meletakkan dasar dan kerangka epistemologi ilmu kolonial Melayu, berdasarkan skema klasifikasi dan teori sosial Eropa, melalui konsep ‘bangsa Melayu berdasarkan bahasa’, ‘konsep wilayah Melayu’, ‘konsepsi sejarah Melayu’ dan ‘konsep ras melayu’. Singkatnya, apa yang telah dilakukannya ialah meletakkan dasar berpikir atau ‘paradigma Raffles’.

Selain itu, ada pengertian Melayu yang lebih luas dan universal daripada pengertian Melayu secara agama, geografis dan etnis. Konsep itu adalah “Alam Melayu” seperti yang dikemukakan oleh James T. Collins (2005). Menurutnya, konsep Alam Melayu adalah konsep kultural yang berdasarkan pada peranan bahasa Melayu dalam batas geografi Asia Tenggara. Dalam konsep ini Melayu tidak hanya sebatas etnis dan agama (Islam) melainkan semua komponen penduduk Asia Tenggara yang bahasanya dituturkan menggunakan bahasa Melayu. Dari konsep ini dapat ditarik kesimpulan umum bahwa orang-orang dari etnis apapun di Asia Tenggara ini, sekalipun tidak beragama Islam, termasuk ke dalam keluarga besar Melayu asalkan mereka berbahasa Melayu. Melayu ini dapat dikategorikan sebagai Melayu “tua”.

Menurut Munawar (2003) dalam Bakran Suni (2007: 12) Suku Melayu di Kalimantan Barat pada hakikatnya terdiri dari orang Melayu asli yang berasal dari Sumatera atau Semenanjung Malaka dan yang berasal dari orang-orang Dayak dari proses Islamisasi. Sekarang antara keduanya tidak lagi dapat dibedakan mana yang asli dan mana yang bukan.

Orang Dayak⁵ adalah penduduk asli (*indigenous people*) pulau Kalimantan atau Borneo. Menurut asal-usulnya, mereka ini adalah imigran dari daratan Asia, yakni Yunan di Cina Selatan. Kelompok imigran yang pertama kali masuk adalah kelompok ras Negrid dan Weddid (Coomans 1987) yang kini tidak ada lagi, serta ras Australoid. Selanjutnya adalah kelompok imigran Melayu yang datang sekitar tahun 3000-1500SM. Kelompok imigran terakhir adalah kelompok yang masuk sekitar tahun 500 SM (Coomans, 1987), yaitu ras Mongoloid (Coomans 1987; Sellato 1989).

Pengaruh Agama

Harus diakui bahwa agama memiliki kekuatan luar biasa untuk menghimpun manusia. Bahkan kemudian agama menentukan identitas manusia. Identitas yang dikaitkan dengan agama inilah awal terbentuknya politik identitas. Kejadian ini diperkuat ketika kolonialisme menguasai Kalimantan. Dalam urusan agama ini, kolonial Belanda yang menerapkan politik pecah-belah telah menimbulkan suatu ketegangan antara suku-suku bangsa di Kalimantan Barat. Islam ditemukan pada 80 persen lebih wilayah Sambas, sepanjang sungai Kapuas sampai ke Putussibau, sepanjang Sungai Mempawah, Sungai Landak, Sungai Pawan dan Sukadana. Tetapi di bagian pedalaman yang jauh dari aliran sungai agama Kristen berkarya disitu oleh karena Belanda telah membatasi penyebaran Islam kesana. Penyekatan di Sungai Kapuas dilakukan Belanda dengan mendirikan gereja di Sejiram, bahkan gereja disini adalah yang pertama di Kalimantan Barat. Hingga kini di Kalimantan Barat perasaan suku sangat kuat, dan jelaslah bahwa agama Kristen dan agama Islam tidak sukses mengatasi sentimen ini.

⁵ Masyarakat Dayak di Pulau Kalimantan terdiri dari kelompok-kelompok suku besar dan sub-sub suku kecil. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa jumlah subsuku Dayak bekisar 300 sampai 450-an (Sellato 1989; Rousseau 1990).

Dewasa ini istilah Melayu digunakan sebagai kontras Dayak. Istilah Melayu tidak digunakan sebagai referensi etnis tetapi sebagai referensi Islam kontras non-Islam. Peningkatan jumlah yang besar orang Melayu di Kalimantan disebabkan oleh orang asli atau Dayak yang memeluk Islam dan bukan karena jumlah besar orang Melayu yang merantau ke Kalimantan.

Di Kalimantan Barat, Orang Dayak yang masuk Islam di sebut Senganan, sehingga dapat dikatakan bahwa sembilan puluh persen orang Melayu di Perhuluan Sungai Kapuas, Sungai Landak, Sungai Mempawah dan juga di Sambas adalah Senganan. Merujuk Coomans (1987:31) di Kalimantan Timur orang Dayak yang masuk Islam disebut 'Halo'.

Coomans (1987: 32) mengatakan bahwa penggunaan istilah itu menekankan gagasan orang Dayak, bahwa mereka yang masuk agama Islam memisahkan diri dari segala ikatan sosial semula, membuang segala adat yang diwariskan dari nenek moyang. Bahkan untuk menjaga agar mereka tidak najis, hubungan sosial dengan keluarga asal semakin dikurangi. Hal itu berarti bahwa persatuan genealogis (keturunan) mereka tinggalkan dan mementingkan persatuan lokal sebagai persatuan umat. Sementara bagi orang Dayak ikatan keturunan sangat penting.

Thambun Anyang (1996: 78) mencatat satu hal yang sangat menarik mengenai proses perpindahan agama ini. Pada waktu zaman kolonial masyarakat suku Dayak yang ingin melanjutkan sekolah yang didirikan kerajaan terlebih dahulu harus masuk Islam supaya tidak diejek sebagai orang kafir atau orang yang dihina sebagai pemotong kepala.

Dapatlah dikatakan bahwa agama Islam merupakan ikatan religius, politik, dan sosio ekonomis sekaligus. Orang Dayak yang mengubah identitasnya menjadi Melayu dan kemudian mereka diakui sebagai Melayu oleh orang Melayu telah menjadi isu yang penting dalam kaitan dengan persaingan politik identitas di Kalimantan Barat sampai saat ini.

Hegemoni Etnik

Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tahun 1945-1949 Kalimantan Barat berada dalam pengaruh NICA⁶ dengan status daerah Istimewa di bawah pemerintahan Sultan Hamid II, ketika itu beliau adalah Sultan di Kesultanan Pontianak. Sultan Hamid ialah salah seorang tokoh politik pada masa itu yang menghendaki bentuk Nasionalisme Indonesia berupa federal yang terhimpun dalam *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO)⁷. Bukan Nasionalisme Federal dengan Republik Indonesia Serikat⁸ (RIS) yang tidak lagi berhubungan dengan kerajaan Belanda. Sultan Hamid juga menjadi ketua delegasi *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO), sebagai pihak ketiga dalam perundingan Belanda-Indonesia, pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Agustus 1949. Hasilnya, kerajaan Belanda setuju menyerahkan kekuasaan kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949.

Atas ketokohnya itu, pada Januari 1950, Presiden Soekarno mengangkat Sultan Hamid sebagai Menteri Negara Zonder Porto Folio. Tugasnya merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Pada Februari 1950, tugas tersebut selesai dengan diresmikannya lambang Garuda Pancasila. Diangkatnya Sultan Hamid dapat dimaknai sebagai pengakuan eksistensi politik etnik Melayu ketika itu.

⁶ Pada Oktober 1946, *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) mendirikan sebuah Dewan Kalimantan Barat yang beranggotakan perwakilan dari 40 kelompok etnis, pegawai pemerintah dan seorang anggota dari masing-masing keswaprajaan yang baru dikukuhkan kembali. Letnan Gubernur van Mook tampak menggunakan dewan ini sebagai batu loncatan untuk membuat negara sendiri di Kalimantan Barat –seperti yang telah dilakukannya untuk negara Indonesia Timur di dalam kaitannya mendirikan Negara Indonesia Serikat (federasi). Namun Sultan Hamid dan Sultan Parikesit dari Kutai (Kalimantan Timur) menentang kehendak tersebut. Meskipun tetap memisahkan diri dari otoritas lainnya. Di tengah perjalanannya, beberapa bulan setelah penandatanganan persetujuan Renville pada Januari 1948, yang menghentikan agresi militer Belanda pertama, pengakuan teritorial Indonesia hanya meliputi Jawa dan Sumatera. Lebih lanjut NICA menjalankan konsep federalismenya melalui penunjukan Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa (DIKB).

⁷ Struktur ini kepalanya Ratu Belanda. Ia semacam *commonwealth*. Ini mirip negara-negara bekas koloni Inggris. Mereka sudah merdeka --seperti India dan Malaysia-- namun masih punya lembaga persema-kuran dengan London. BFO meliputi Jawa Tengah, Borneo Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur (tidak termasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir), Bangka, Belitung dan Riau.

⁸ RIS terdiri dari tujuh negara bagian yaitu: Republik Indonesia (Jogjakarta), Negara Indonesia Timur (Makassar), Negara Pasundan (Bandung), Negara Jawa Timur (Surabaya namun didirikan di Bondowoso), Negara Madura, Negara Sumatera Timur (Medan) dan Negara Sumatera Selatan.

Tanpa diduga, tak berapa lama setelah tugas pertamanya menyelesaikan lambang Negara Indonesia, terjadilah “pemberontakan” Angkatan Perang Ratu Adil di Jawa Barat yang dipimpin oleh kapten KNIL Raymond Westerling. Mereka hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Anggota-anggotanya ialah mantan tentara KNIL di Nasionalisme Pasundan. Westerling telah merancang kabinet bayangan bersama kolonel KNIL Syarif Hamid. Menyusul peristiwa itu Sultan Hamid ditangkap, diadili dan dipenjara selama 10 tahun.

Di penjara, Sultan Hamid tak bisa berbuat banyak ketika Soekarno membuat kampanye membongkar RIS dan BFO. Struktur nasionalisme federasi, yang memberi kekuasaan lebih besar kepada daerah, hanya berumur delapan bulan. Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno membubarkan RIS dan BFO. Soekarno kemudian membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang.

Jatuhnya Sultan Hamid kemudian berdampak pula terhadap jatuhnya pamor hegemoni etnik Melayu di Kalimantan Barat. Selain itu kebijakan politik Orde Lama yang membubarkan Kerajaan-kerajaan Melayu, antara 1950 hingga 1956 juga berpengaruh serius. Namun yang paling serius adalah akibat dari pembunuhan massal banyak pemimpin oleh kolonial Jepang di Mandor (1944-45). Sehingga bisa dikatakan bahwa Etnik Melayu pada saat itu mengalami krisis kepemimpinan yang parah. Sultan Hamid juga tak bisa berbuat banyak ketika Daerah Istimewa Borneo Barat diubah menjadi Provinsi Kalimantan Barat pada 1957.

Sementara itu, pada Pemilu pertama tahun 1955, Partai Persatuan Dayak menang mayoritas di Kalimantan Barat. Oleh karena itu Ketua partai tersebut yaitu JC Oevang Oeray⁹ seorang Dayak Kayan dinobatkan sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Selain itu etnik Dayak juga menduduki 4 posisi bupati dari 7 kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Etnik Dayak pada masa ini melakukan hegemoni terhadap etnik Melayu dengan menguasai posisi pegawai-pegawai pemerintahan lainnya. Perilaku Gubernur Oevang Oerai yang menarik pada periode ini adalah banyak memberi beasiswa kepada pemuda/i Melayu untuk melanjutkan sekolah di Jawa.

⁹ Beliau bersama-sama FC Palaunsuka adalah tokoh penting partai Persatuan Dayak, mereka berdua adalah orang-orang generasi pertama yang bersekolah pada persekolahan Nyarumkop yang dibina Mubaligh Kristen Katolik. Sebelumnya mereka berdua adalah cikgu di sekolah rendah di pekan Putussibau-Kapuas Hulu yang dianjurkan oleh misi pendidikan Kristen Katolik.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada era Orde Lama (ORLA), etnik Dayak melakukan hegemoni dengan menguasai peranan strategis pada pemerintahan dan politik di Kalimantan Barat. Sedangkan etnik Melayu pada masa ini mengalami marginalisasi.

Marginalisasi etnik

Bertolak belakang dengan rejim ORLA, pada masa Orde Baru (ORBA), etnik Dayak terhegemoni dan dimarginalisasikan, rumah-rumah panjang mereka dihancurkan dengan dalih sanitasi jelek. Budaya Dayak benar-benar hancur akibat dari kebijakan ini. Perlakuan yang tidak adil ini membuat karakter-karakter kekerasan dalam budaya mengayau¹⁰ seolah tumbuh kembali. Padahal, budaya ini sudah lebih dari 100 tahun telah hilang¹¹.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kelompok etnik Dayak justru mengalami penjajahan dari negeri sendiri. Hak dan kedaulatan mereka dipasung dengan perundang-undangan, kawasan adat mereka sering diserobot tanpa kompromi (alasan tanah nasionalisme) dan yang paling tragis dan sangat menghancurkan Dayak sebagai masyarakat adat adalah ketika diberlakukannya UU No 5 tahun 1974 dan 1979 tentang

¹⁰ Dalam salah satu analisis yang dilakukannya terhadap berbagai kerusuhan antaretnis di Kalimantan Barat, Nancy Lee Peluso, Ph.D menggambarkan dengan sangat baik bagaimana proses tersebut berlangsung. Menurut Nancy, kekerasan yang mengemuka dalam setiap konflik yang terjadi antara Dayak dan Madura merupakan hasil dan akibat dari sebuah strategi yang dipakai oleh militer dalam penumpasan Pemberontakan PGRS/PARAKU dengan memobilisir *image* Pengayau orang Dayak. *Image* orang Dayak sebagai “Borneo Headhunter” yang dikonotasikan liar, kejam, kanibal dan haus darah ini awalnya sengaja dieksploitasi untuk menimbulkan dampak psikologis.

¹¹ Selain menciptakan peperangan, kolonialis Belanda juga memfasilitasi perdamaian. Salah satunya pertemuan perdamaian yang terkenal dengan nama Perdamaian Tumbang Anoi di Desa Huron Kahayan Hulu Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Mei s/d 24 Juli 1894, dimana musyawarah besar itu berhasil menyepakati bahwa peperangan, perbudakan dan perburuan kepala di antara suku non Muslim dinyatakan dilarang. Peradaban yang tanpa peperangan dan pemenggalan kepala telah lahir. Kesepakatan bersama pada pertemuan ini pun diambil yaitu: menghentikan kebiasaan perang antarsuku (*asang*) dan pemenggalan kepala (*hakayau*). Menghentikan kebiasaan balas dendam (*habaleh-bunu*). Sejak itu tidak ada lagi korban kepala manusia dan perbudakan. Denda adat (*jipen*) yang dulunya dalam rupa manusia diganti dengan uang. Hukum adat diberlakukan sebagai sistem peradilan suku. Inilah salah satu bentuk perdamaian yang dihasilkan dari usaha Belanda. Peristiwa ini menguatkan berbagai cerita “kayau” sesama Dayak, di mana terjadi peperangan antarsuku-suku per daerah aliran sungai. Meskipun warisan yang ada tetap dipertahankan, upaya-upaya kolonial ini patut mendapatkan penghargaan. Khususnya, melalui penyatuan perwakilan Dayak yang tersebar, Belanda menyatukannya dengan suatu kesadaran akan nasib yang sama tumbuh. Dan tentunya, sebuah perkenalan yang familiar. Penciptaan perdamaian oleh kolonialis juga terlihat secara jelas dalam pembentukan identitas Dayak. Untuk menciptakan stabilitas di hulu Kapuas (dan pada daerah Kalimantan Tengah yang luas), terlepas dari penghancuran ketidakamanan, Belanda menegosiasikan gencatan senjata, memperkuat perkampungan dan dalam beberapa kasus memindahkan seluruh penduduknya ke lokasi-lokasi aman. Selengkapnya baca : www.dayak21.org

Pemerintahan Desa, dimana segala sesuatu harus seragam. Kedua UU ini adalah bentuk pengingkaran dan pengkhianatan terhadap cita-cita para pendiri Republik Indonesia yang mencantumkan falsafah negara *Bhinneka Tunggal Ika*. Falsafah ini dilanggar dan bahkan diinjak-injak dengan memakai simbol pembangunan¹².

Kebijakan penyeragaman yang dilakukan pemerintahan ORBA lebih dikenal dengan istilah “Jawanisasi”. Rakyat tabu membicarakan suku, agama dan ras (SARA). Model pemerintahan lokal dihapus dan digantikan dengan sistem di Pulau Jawa. Yekti Maunati (2004: 2) menjelaskan dalam bukunya *Identitas Dayak* sebagai berikut:

Pemerintahan Orde Baru memobilisasi isu SARA untuk mengendalikan masyarakat melalui bahasa dan etnisitas. Sepanjang masa berkuasanya pemerintahan Orde Baru, nasionalisme berusaha menyeragamkan perbedaan-perbedaan budaya demi kepentingan ‘pembangunan nasional’ (misalnya, demi mempromosikan pariwisata). Jadi, ada ruang bagi perbedaan-perbedaan etnis asalkan tidak membahayakan ‘kepentingan nasional’. Memang, ideologi nasionalisme Indonesia “*Bhinneka Tunggal Ika*” secara eksplisit mengakui perbedaan budaya dan peran perbedaan budaya ini menentukan karakter bangsa Indonesia sebagai sebuah masyarakat yang plural dan toleran. Tetapi sekarang tampaknya nasionalisme telah kehilangan kendali atas proses-proses identitas budaya yang dulu pernah dicoba untuk diseragamkan guna kepentingan-kepentingan pembangunan nasionalisme. Sekarang sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto, tampaknya di berbagai daerah urutan prioritasnya sudah secara efektif dibalik. Sekarang, pemikiran-pemikiran tentang pembangunan nasional dan modernisasi nasional telah digantikan dengan konflik-konflik berbasis-etnis yang berkaitan dengan isu pembangunan yang tidak merata dan marginalisasi masyarakat asli (adat).

12 Lihat bagian menimbang UU No. 22 tahun 1999 ayat d,e,f.

Pada masa ini kebijakan politik berupa transmigrasi juga dilakukan secara besar-besaran. Kebijakan transmigrasi ini telah menimbulkan kepanikan pada suku-suku asli, terutama Dayak. Karena sebagian besar lokasi transmigrasi di tanah-tanah adat etnik Dayak. Mereka tidak senang dengan suku-suku luar¹³ yang mencaplok teritorinya.

Pembiaran Konflik Kekerasan

Pada masa transisi peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru yaitu tahun 1966-67 terjadi kekerasan berbau SARA yang parah. Kekerasan ini melibatkan identitas etnik yaitu antara Dayak dengan Cina. Kekerasan ini terasa ganjil karena sebenarnya kedua etnik ini memiliki hubungan yang erat. Pada tahun terakhir pemerintahannya, Gubernur Oevang Oerai ditekan agar mengusir etnik Cina dari kawasan pedalaman Kalimantan Barat. Pengusiran ini berkaitan dengan penumpasan anggota Partai Komunis Indonesia dan PGRS-Paraku¹⁴. Dalam posisi kekuasaan yang lemah, Gubernur Oevang Oerai akhirnya terpaksa

¹³ Ada karakteristik khusus pula pada suku-suku pendatang yang membuat andil pada perseteruan Dayak-Madura. Suku Jawa dikenal sebagai birokrat dan guru, suku Batak sebagai karyawan penting perkebunan dan tentara, suku Minang sebagai pegawai negeri dan pedagang makanan, suku dari Flores dikenal sebagai guru dan agamawan (pastor). Sementara itu suku Dayak dan Madura merasa sama levelnya yaitu, sama-sama petani yang bekerja di tempat yang keras, berkeringat dan panas. Perseteruan ini menjadi semakin genting ketika rezim ORBA memberi kesempatan kepada orang Madura untuk menjadi Bupati di Kalimantan Barat, membiarkan transmigrasi swakarsa masuk secara tak terkendali (setiap kapal Lawit dari Surabaya tiba, selalu ada trans Madura yang datang) sedangkan Dayak tidak diberi kesempatan. Jangankan menjadi Bupati menjadi PNS saja dipersulit. Tercatat selain Bupati ada pula pejabat Militer orang Madura yang bertugas di Kalimantan Barat pada era ini.

¹⁴ Peristiwa ini berkaitan dengan peristiwa tahun 1965-1966 di Pulau Jawa, di mana terjadi pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Mayor Jenderal Soeharto. Jawa menyaksikan pembunuhan besar-besaran terhadap orang komunis. Tahun 1967 militer Indonesia menghantam Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak, yang dulu direkrut Presiden Soekarno guna menyusup ke wilayah Malaysia. Ideologi PGRS kekiri-kirian, dan mayoritas gerilyawan PGRS adalah pemuda Tionghoa. "Tentara tidak sanggup melawan PGRS maka mereka rekrut orang Dayak. Tentara menjadikan Dayak sebagai alat mengusir orang-orang Cina dari pedalaman Kalimantan. Orang-orang itu diusir dari kecamatan-kecamatan. Banyak orang Cina lari ke Jawa. Pengungsi Tionghoa di kamp-kamp pengungsian ada sekitar 60.000 orang. Menurut Pastor Herman Josef van Hulsten dalam buku *Hidupku di Antara Suku Daya: Catatan Seorang Misionaris* serta wartawan David Jenkins dari majalah *Far Eastern Economic Review*, minimal 3.000 orang Tionghoa dibunuh pada 1967.

mengikuti kebijakan dari pusat, yaitu dengan memobilisir etnik Dayak untuk mengusir etnik Cina dari kawasan pedalaman. Jamie Davidson¹⁵, menyebut pembantaian 1967 sebagai “membangunkan kembali budaya kekerasan” di Kalimantan Barat.

Kedatangan banyak etnik lain dari berbagai kawasan Indonesia ke Kalimantan Barat telah menimbulkan ketakutan pada etnik asli yaitu Dayak. Dari sekian banyak suku luar yang datang, suku Madura adalah yang paling berani¹⁶. Faktor “menantang” inilah yang kemudian menyebabkan kedua suku hidup dalam keadaan “siap berperang”¹⁷. Sedikit saja ada konflik antara keduanya, tidak terlalu sulit untuk menjadi besar (kekerasan). Akibat berbagai perlakuan diskriminatif yang dialami kelompok etnis Dayak pada Masa Orde Baru, mereka menjadi sangat mudah emosi. Hanya dipicu oleh persoalan yang sangat sepele, dengan mudah membangkitkan kemarahan komunal.

Rentetan perkelahian kedua ini, jejaknya dimulai pada tahun 1968 . Kekerasan pada masa itu dipicu oleh pembunuhan terhadap Sani (Camat Sungai Pinyuh yang orang Dayak Kanayatan) oleh Sukri warga Madura. Pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh penolakan Camat tersebut untuk melayani pengurusan surat keterangan tanah pada hari minggu karena Camat itu akan ke gereja.

Kejadian ini terjadi pada awal tahun 1968. Kematian Sani kemudian tersebar ke kampung-kampung Dayak. Tanggapan spontan kemudian tak dapat dihindari. Etnik Dayak yang masih diselimuti suasana hati “pengusiran etnik Cina” kemudian membakar dan membunuh etnik Madura di beberapa kecamatan seperti Mempawah Hulu, Menjalin, Toho, Anjungan dan kawasan-kawasan pedalaman lainnya. Setelah kasus ini, kejadian konflik terus berulang, yang meletusnya berdekatan dengan peristiwa politik. Selengkapanya mengenai konflik yang melibatkan etnik Dayak di Kalimantan Barat disajikan dalam bentuk tabel agar lebih ringkas. Lihat tabel di bawah ini.

Dari tabel di atas, setidaknya ada dua hal yang bisa kita catat. Pertama,

¹⁵ Jamie Davidson (2002:136-184) dari Universitas Washington dalam tesis Ph.D, *Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia*

¹⁶ Dibaca menantang.

¹⁷ Keadaan darurat, bahasa aparat keamanan.

Tabel 1
Kekerasan Etnik di Kalimantan Barat dengan Peristiwa Politik

No.	Waktu	Lokasi	Keterangan
1.	1966-67	Kabupaten Sambas, Pontianak, Sanggau, Sintang, Ketapang	Konflik etnik Dayak dengan Cina. Seluruh etnik Cina diusir dari kampung-kampung pedalaman Kalimantan Barat. Konflik ini didukung oleh militer yang dikaitkan dengan penumpasan PKI dan PGRS-Paraku. Pada masa ini terjadi penggulingan Gubernur Oevang Oerai dan 4 orang Bupati dari etnik Dayak
2.	1968	Anjungan, Kabupaten Pontianak	Konflik etnik Dayak dengan Madura, konflik dipicu oleh pembunuhan terhadap Sani (Camat Sungai Pinyuh yang orang Dayak Kanayatan) oleh Sukri warga Madura. Pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh penolakan Camat tersebut untuk melayani pengurusan surat keterangan tanah pada hari minggu karena Camat itu ingin ke Gereja. Pada masa ini suasana politik tidak menentu.
3.	1976	Di Sungai pinyuh, Kabupaten Pontianak	Konflik etnik Dayak dengan Madura, konflik dipicu oleh terbunuhnya seorang Dayak Kanayatan, yaitu Cangkeh asal Liongkong/Sukaramai yang dilakukan oleh seorang warga Madura yang mengambil rumput di tanah milik korban. Peristiwa ini terjadi sebelum Pemilu tahun 1977
4.	1977	Di Singkawang, Kabupaten Sambas	Konflik ini dipicu oleh terbunuhnya seorang Dayak Kanayatan anggota Polri bernama Robert Lanceng oleh seorang warga Madura. Sebelum kejadian, korban menegur adik perempuannya agar jangan pergi keluar rumah malam hari bersama pemuda Madura tersebut. Peristiwa ini pada tahun yang sama dengan Pemilu dan sebelum pemilihan Gubernur
5.	1979	Kabupaten Sambas	Konflik dipicu oleh pertengkaran masalah hutang yang menyebabkan Sakep (seorang Dayak Kanayatan) diserang oleh tiga orang Madura. Dua Dayak Kanayatan lainnya hampir terbunuh. Konflik ini merupakan dampak dari kekecewaan dari etnik Dayak karena hanya sedikit etnik Dayak yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif.
6.	1982	Pak Kucing, Kabupaten Sambas	Konflik dipicu oleh pembunuhan terhadap Sidik seorang warga Dayak Kanayatan oleh Aswandi seorang warga Madura karena korban menegur Aswandi yang mengambil rumput di sawah miliknya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pada tahun ini juga dilaksanakan Pemilu.
7.	1983	Sungai Enau, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak	Konflik dipicu oleh Dul Arif seorang warga Madura yang melakukan pembunuhan atas seorang warga Dayak Kanayatan yang bernama Djaelani karena masalah tanah. Peristiwa terjadi setelah Pemilu dan menjelang pemilihan Gubernur
8.	1992	Pak Kucing, Kabupaten Sambas	Konflik dipicu oleh pemerkosaan terhadap anak Sidik (yang terbunuh pada tahun 1982) yang dilakukan oleh seorang warga Madura. Peristiwa terjadi pada masa yang sama dengan Pemilu.
9.	1993	Kotamadya Pontianak	Konflik massal dipicu oleh perkelahian antarpemuda Dayak dengan pemuda Madura yang mengakibatkan kerusakan dan pembakaran terhadap Gereja Paroki Maria Ratu Pencinta Damai dan Persekolahan Kristen Abdi Agape. Peristiwa ini terjadi setelah Pemilu dan menjelang Pemilihan Gubernur.
10.	1994	Tubang Titi, Kabupaten Ketapang	Konflik dipicu oleh penusukan seorang Dayak oleh seorang Madura yang sedang bekerja di proyek pembangunan jalan. Pada masa ini dilaksanakan pemilihan Bupati Sintang. Calon Dayak dikalahkan etnik Melayu karena ada pengkhianatan.
11	28 Des 1996	Sanggau Ledo, Kabupaten Sambas	Konflik dipicu oleh tertusuknya Yakundus dan Akim, dua pemuda Dayak Kanayatan di Sanggau Ledo oleh pemuda Madura, yaitu Bakri dan empat temannya. Konflik ini terjadi menjelang Pemilu.
12.	15 Jan-28 Feb 1997	Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau Kapuas, dan Kotamadya Pontianak	Konflik Dayak-Madura di daerah Kabupaten Sambas mulai mereda, tetapi kemudian meledak lagi setelah terjadi penyerangan terhadap kompleks persekolahan SLTP-SMU Asisi di Siantan. Dalam peristiwa ini dua perempuan Dayak Jangkang (Sanggau Kapuas) dan Dayak Menyuke (Landak) luka-luka. Kemudian, terbunuhnya seorang warga Dayak Kanayatan asal Tebas-Sambas, yakni Nyangkot oleh sekelompok warga Madura di Peniraman. Pada tahun ini dilaksanakan Pemilu, pemilihan Bupati Sanggau dan pemilihan Gubernur. Selain itu, keadaan politik nasional di Jakarta juga sedang memanas.
13	17 Jan 1999	Kab Sambas	Dikenal sebagai kasus parit Setia, kerusuhan antara Melayu dan Madura. Peristiwa ini terjadi pada tahun diadakannya Pemilu 1999.
14	Maret 1999	Kabupaten Sambas, dan Kotamadya Pontianak	Berbarengan dengan konflik Melayu Sambas-Madura, terjadi pembunuhan terhadap Martinus Amat warga Dayak Kanayatan Samalantan sehingga mengundang simpati warga (Dayak Kanayatan) di Samalantan dan Sanggau Ledo untuk membalas. Pada masa ini juga berlangsung pemilihan Bupati Pontianak yang rusuh karena gedung DPRD Mempawah dibakar massa. Di Bengkayang juga terjadi kekacauan pada pemilihan Bupati Bengkayang. Yang menarik bahwa pada masa ini juga bersamaan dengan pemilihan anggota MPR yang akan mewakili etnik di Kalimantan Barat.
15	Maret 2003	Sei Duri	Melayu Sambas marah karena pemukiman mereka di Sei Duri dimasukkan ke dalam wilayah kabupaten Bengkayang yang dipimpin Dayak Selako. Pada tahun ini juga dilaksanakan pemilihan Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilu.
16	2007	Kota Pontianak	Melayu rusuh dengan Cina, kasusnya dipicu oleh tergores mobil seorang etnik Melayu. Peristiwa ini terjadi setelah Pemilihan Gubernur, calon dari Melayu Kalah. Selain itu pada Pemilihan Walikota Singkawang, etnik Cina yang menang sedangkan calon dari Melayu kalah.
17	2008	Kota Singkawang (Sambas)	Melayu rusuh lagi dengan Cina di Singkawang, dipicu pembangunan patung Naga. Pada masa ini juga berlangsung Pemilu 2009.

Sumber: diolah dari berbagai data yang dikumpulkan.

konflik yang melibatkan etnik Dayak terjadi mulai tahun 1966 - 1997. Pada masa ini etnik Dayak disingkirkan dari kekuasaan politik dan mereka menjadi korban hegemoni pihak yang berkuasa ketika itu. Kedua, sejak tahun 1999, etnik Dayak tidak berkonflik lagi, pada masa ini yang terlibat konflik adalah etnik Melayu. Etnik Melayu berkonflik karena mereka merasa terancam. Pada level pemerintahan provinsi mereka tersingkir, sehingga secara politik mereka kalah bahkan terhegemoni oleh etnik Dayak.

Dari uraian di atas, penulis akhirnya membuat kesimpulan bahwa berbagai konflik etnik yang kemudian menjadi kekerasan etnik di Kalimantan Barat, akar penyebabnya bukan karena perbedaan budaya, tetapi sungguh jelas memiliki keterkaitan dengan aktivitas politik etnik dan upaya melawan hegemoni etnik yang berkuasa. Bukan hanya di Kalimantan Barat tetapi di seluruh kawasan di Indonesia selama 30 tahun terjadi peristiwa yang hampir sama, yaitu adanya kekerasan politik pada saat berlangsungnya kegiatan/pesta politik sebagai momen melawan hegemoni. Kesimpulan penulis ini sesuai pula dengan pendapat George Junus Aditjondro (2001: 6-7). Beliau bahkan dengan berani mengatakan:

”... Saya berani bertaruh bahwa “tukang-tukang kompor” yang dibayar Cendana akan mengobarkan semangat jihad menentang pengganyangan orang Madura di Kalimantan Barat. Dan, mungkin saja, akan banyak yang terhasut. Sebab, banyak orang lupa bahwa dibalik pemberontakan koalisi Dayak dan Melayu melawan para migran Madura, tersembunyi semangat yang sama seperti di Maluku, yakni rasa ketidakpuasan “daerah” melawan “pusat” akibat ketatnya pengelola Nasionalisme Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh tentara.... Mereka siap membantai rakyat dengan peluru maupun dengan mengorbankan intrik-intrik perkelahian antaragama, antarras, dan antarkelompok etnik. Itu sebabnya, SARA sekian lama diharamkan untuk dibicarakan selama Orde Baru. Sebab, hal itu menyerang jantung mekanisme propaganda mereka.

Adanya temuan yang penulis uraikan di atas, penulis kemudian menolak

hasil dari analisis para sarjana yang mengatakan bahwa konflik antara orang Dayak dengan orang Madura di Kalimantan Barat disebabkan oleh benturan budaya dan praduga-praduga yang didasarkan pada stereotip yang negatif. Dari data yang penulis paparkan dalam tabel di atas, tampak jelas bahwa akar konflik dan kekerasan adalah persaingan politik yang membawa serta identitas etnik, adapun faktor budaya dan stereotip hanyalah faktor yang dipergunakan pihak berkepentingan untuk mengatakan bahwa pilihan mereka melakukan kekerasan bisa dibenarkan atau diterima atau rasional.

Para peneliti lokal pada masa lalu tidak berani mengaitkan peristiwa kekerasan dengan politik karena pada masa itu sedang berlangsung pemerintahan Orde Baru yang dipenuhi manipulasi informasi dan ketakutan intelektual. Para peneliti pada masa itu mungkin takut ditangkap jika menyampaikan hasil analisis yang bertentangan dengan keinginan Orde Baru.

Yang menarik bahwa Etnik Melayu tidak mau melibatkan diri dalam konflik Dayak -Madura ini. Bahkan mereka tidak melakukan kekerasan dengan etnik Madura, walaupun sebenarnya ada anggota etnik mereka juga yang bersengketa dengan etnik Madura. Dalam semua bentuk tercatat enam belas (16) kali¹⁸ terjadi konflik etnik Melayu Sambas dengan Madura tersebut. Berikut penulis kemukakan datanya.

Pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1955, di kampung sungai Dungun rumah orang Melayu bernama Apsah Bt Amjah dirampok oleh oknum etnik Madura, bahkan suami Apsah terbunuh pada kejadian ini. Kemudian tahun 1960, di Kampung Semparuk A, seorang warga Melayu bernama Manaf Ikram dirampok oleh oknum etnik Madura. Selanjutnya pada tahun 1960 juga, di Kampung Parit Setia, Haji Sihabudin (Melayu) dirampok oleh Marju (Madura). Tahun 1961 juga di Kampung Sentebang terjadi perkelahian sebagai dampak dari pencurian jambu milik orang Melayu yang dilakukan oleh oknum Madura. Selanjutnya pada tahun 1964, di Kampung Sui Nyirih, rumah Rabudin (Melayu) dirampok oleh oknum Madura. Tahun 1966 terjadi 2 kali tindak kriminal yaitu di Kampung Nilam, Mahwi seorang guru yang berasal dari etnik Melayu dibunuh oleh Askan dari etnik Madura.

¹⁸ Selengkapnya lihat, Alpha Amirrachman, 2007: 39-40, *Revitalisasi Kearifan Lokal, Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*.

Kemudian, Rumah H Saleh (Melayu) dirampok oleh Simin (Madura).

Adapun pada masa Orde Baru, tahun 1974 terjadi perkelahian antara etnik Melayu dengan Madura di Kampung Jawai Laut dan Matang Tarap. Selanjutnya, tahun 1978 kejadian yang sama terjadi di Kampung SB Kuala, tahun 1980 terjadi lagi di Kampung Lambau, kemudian tahun 1985 dan 1987 terjadi kembali di Kampung Matang Tarap. Selanjutnya tahun 1996 terjadi lagi perkelahian di Kampung Semperiuk B, tahun 1997 di Kampung Lambau Pelimpaan dan tahun 1998 di Kampung Usrat. Baru pada tahun 1999 terjadi konflik besar, yang peristiwanya diawali dari Kampung Parit Setia.

Lembaga Etnisitas

Pada Pemerintahan Orde Baru, etnik Dayak memulainya dengan mendirikan Majelis Adat Dayak (MAD). Etnik Dayak bersatu karena semakin terancam eksistensinya. Pada masa itu komunikasi dan konsolidasi antartokoh Dayak terpelajar meningkat pesat. Organisasi ini merupakan organisasi keetnis yang pertama dibentuk di Kalimantan Barat. Menurut Iqbal Jayadi (2003: 4):

Orde Baru adalah masa kontemplasi dan konsolidasi bagi Dayak. Dalam masa panjang itu, mereka berusaha semakin menguatkan identitas etnik mereka dengan mengontraskan perbedaan antara Dayak dengan Melayu. Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai Kristen, penduduk asli, mayoritas, namun dijajah oleh Melayu yang mereka anggap sebagai Islam, pendatang dan minoritas. Mereka mendirikan berbagai organisasi sosial-politik dan ekonomi yang berusaha memberdayakan kumpulan etniknya. Belas tahun kemudian, pemberdayaan tersebut berhasil mentransformasikan dirinya sebagai suatu gerakan politik. Dengan berbagai ancaman kekerasan, mereka melakukan demo menentang HPH dan perkebunan, dan puncaknya terjadi ketika mereka berhasil memaksakan pemerintahan untuk mengangkat seorang Dayak sebagai bupati sebelum masa Orde Baru berakhir. Secara tidak langsung, berkembangnya pendekatan Dayak yang cenderung pada kekerasan adalah disebabkan oleh sikap perusahaan dan

pemerintahan sendiri yang hanya memperhatikan satu tuntutan bila satu kumpulan bersikap mengancam.

Majelis Adat Dayak (MAD) berdiri pada 1994 oleh sejumlah tokoh politik Dayak di Kota Pontianak. Mulanya kehadiran institusi ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan para tokoh tersebut dengan Golongan Karya sebuah partai dominan di era tersebut.

Melayu awalnya tidak mempedulikan gerakan politik etnik Dayak. Namun, setelah kekerasan etnik Dayak versus Madura pada 1997 berakhir yang kemudian membuat Dayak semakin asertif dan percaya diri dalam memperjuangkan kepentingannya, bukan hanya dalam politik, melainkan juga sosio-kultural. Mereka yang berasal dari kelompok etnik terakhir ini memberikan tanggapan dengan menegaskan bahwa mereka juga merupakan penduduk asli, mayoritas dan juga mengembangkan konsepsi bahwa Dayak dan Melayu adalah saudara, dan bahwa menjadi Islam tidak berarti Dayak kehilangan identitasnya. Lebih jauh Melayu juga mengembangkan berbagai organisasi etnik Kemelayuan dan hukum adat Melayu, seperti MAS Bayu (Majelis Adat dan Seni Budaya Melayu) Lembaga Adat dan Keekerabatan Melayu (Lembayu), dan Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM).

MAS Bayu sebenarnya telah didirikan tahun 1995 di Sambas dan Ketapang¹⁹. Tetapi aktivitas lembaga ini tidak menonjol. Tahun 1999 mereka mendirikan Lembaga Adat dan Keekerabatan Melayu (Lembayu) dan PERMAK (Persatuan Melayu Kalimantan Barat). Basis kedua institusi ini ialah Keraton Kadriah Pontianak dan tujuan pendiriannya ialah untuk meningkatkan martabat kesultanan Melayu sepeninggal Sultan Hamid II.

Selanjutnya, Majelis Adat Budaya Melayu (MABM)²⁰ didirikan pada tahun 1997, yaitu hampir empat tahun setelah MAD didirikan. Isu yang melatarbelakangi berdirinya MABM Kalimantan Barat tahun 1997, salah satunya ialah perlunya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat Melayu. Selain itu, keberadaan MABM diharapkan dapat

¹⁹ Baca, Akcaya pada 18 November 1995, Majelis Adat dan Seni Budaya Melayu terbentuk di Ketapang.

²⁰ Lihat Akcaya, 22 April 1997, dibentuk Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar, seterusnya diterbitkan dua artikel di Akcaya yang memberi sokongan terhadap penubuhan MABM yaitu pada 19 Agustus 1997 dengan tajuk "Demi Bangsa, Negara dan Umat Manusia, artikel pada 20 Agustus 1997 dengan tajuk "Melayu Siapakah dia?". Kedua artikel ditulis oleh Dr Chairil Effendi sekarang Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.

mengawal persoalan adat dan budaya sehingga dapat diwariskan kepada generasi muda. Aktivitas menonjol yang dilakukan MABM sejauh ini adalah menggelar festival Budaya Melayu setiap tahun dan membangun Rumah Melayu.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Orde Baru adalah masa di mana politik identitas Dayak terkonsolidasi. Dengan adanya peminggiran yang sistimatis mereka kemudian bersatu. Masa Orde Baru juga dapat dikatakan bahwa etnik Melayu kembali menduduki posisi strategis pada pemerintahan dan politik di Kalimantan Barat.

Perayaan etnisitas/Otonomi Daerah

Sejak tahun 1998, secara nasional telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari aspek sosial, ekonomi maupun politik. Hal ini diawali oleh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun tersebut yang kemudian secara sistematis telah berimplikasi kepada berbagai aspek kehidupan termasuk sistem politik maupun sistem pemerintahan. Bahkan pada beberapa daerah, krisis tersebut ternyata juga berimplikasi terhadap munculnya berbagai konflik sosial di beberapa wilayah di Indonesia seperti konflik Ambon, Poso, Sambas maupun Sampit. Sehingga sempat dijadikan hipotesis oleh beberapa peneliti dalam laporannya bahwa konflik yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia pada masa itu berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan melemahnya kekuasaan militer di pemerintahan dan berubahnya sistem politik di Indonesia. Terlepas dari terbukti atau tidaknya hipotesis tersebut, yang jelas tuntutan yang sangat kuat akan perubahan dari masyarakat telah menyebabkan bergesernya peta politik di tanah air. Salah satu contoh konkrit adalah hasil Pemilu tahun 1999 yang menempatkan PDI-P sebagai pemenang Pemilu, meskipun belum berhasil menempatkan Megawati sebagai Presiden RI.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 1998 hingga tahun 2008, Nasionalisme Indonesia mengalami dua orde²¹ pemerintahan, 1998-2001 dikenali sebagai orde Reformasi, dan sejak 2002-hingga hari ini dikenali sebagai orde Otonomi Daerah. Tercatat ada 4 orang presiden pada rentang waktu ini²². Di Kalimantan Barat pada periode ini dimulai

²¹ Penamaan Orde merujuk kepada sistem yang berlaku

²² Ketika Soeharto dijatuhkan oleh demonstrasi Mahasiswa tahun 1998, BJ Habibie yang tadinya Wakil

dengan wacana putra daerah²³ sebagai pemimpin daerah. Oleh sebab itu, DPRD Propinsi Kalimantan Barat yang berwenang memilih Gubernur dan wakilnya akhirnya memutuskan mengangkat pasangan Usman Jafar (Melayu) dengan LH Kadir (Dayak) sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Barat. Usman Ja'far (2003-2008) sebenarnya adalah gubernur pertama yang orang Melayu, sejak provinsi ini diadakan pada 1957.

Masa Orde Otonomi Daerah ditandai dengan banyaknya didirikan provinsi dan kabupaten baru di Indonesia. Di Kalimantan Barat yang sebelumnya hanya 7 kabupaten sampai hari ini sudah bertambah menjadi 14 kabupaten/kota. Pendirian sebuah kabupaten baru berdasarkan kepada kebijakan politik untuk memberi peluang kepada penduduk setempat membangun kawasannya. Oleh sebab itu, pada setiap kabupaten terdapat etnik dominan. Di Kabupaten Sambas etnik dominannya adalah Melayu Sambas, walaupun begitu di Kecamatan Sajingan Besar etnik dominannya adalah Dayak Selako. Meskipun etnik Madura hilang dalam daftar kependudukan Kabupaten Sambas, sebenarnya masih ada segelintir orang Madura di kabupaten ini, tetapi mereka dicatat sebagai etnik Melayu²⁴.

DISKUSI CIKAL BAKAL NASIONALISME ETNIK

Politik identitas (termasuk) dengan mempolitisasi agama dapat dipakai terus menerus sebagai alat untuk kepentingan elit dalam berbagai bentuk, seperti gagasan-gagasan dalam jangka panjang menengah (misalnya simbol kota santri/injil), dan juga dapat berdampak diskriminatif. Dalam bagian lain, kebijakan publik dipakai sebagai sarana kekuasaan yang memungkinkan terjadi penguatan politik identitas di satu pihak dan juga melemahkan pihak lain.

Politik identitas juga dikonstruksi dalam proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara intens dalam bentuk interaksi simbolik

Presiden diangkat menjadi Presiden, tahun 1999 ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersidang, Abdurahman Wahid (Gus Dur) diangkat menjadi Presiden. dua tahun Gus Dur berkuasa beliau di jatuhkan MPR dan diangkat Megawati yang sebelumnya Wakil Presiden menjadi Presiden. Pada Pemilu tahun 2004 Susilo Bambang Yudoyono terpilih sebagai Presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

²³ Putra Daerah adalah penduduk asli setempat, dalam konteks Kalimantan Barat saat itu yang dianggap penduduk asli ialah etnik Dayak dengan Melayu.

²⁴ Hasil penelitian lapangan LSM *Peace Building*, YPPN, 2006

untuk memobilisasi dukungan massa. Penguatan identitas diri dari seorang pasangan calon dilakukan dengan membangun identitas diri secara intens di masyarakat. Politik identitas yang berangkat dari *base on identity* dan *base on interest* dijadikan instrumen untuk memperoleh simpati dari masyarakat. Perkembangan politik identitas saat ini telah mengalami pencerabutan makna identitas sesungguhnya karena identitas diproduksi bukan untuk kepentingan identitas itu sendiri tetapi lebih untuk kepentingan elite yang memproduksinya.

Dalam setiap Pilkada di Provinsi Kalimantan Barat, hal pertama yang akan kita dengar adalah, isu mengenai putra daerah. Sejauh mana sang calon pemimpin mempunyai “titisan darah” sebagai putra daerah. Isu mengenai putra daerah muncul, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Ada kalimat dalam salah satu pasal yang berbunyi, kepala daerah adalah orang yang mengerti daerahnya. Kalimat itu diterjemahkan secara kasat mata menjadi orang yang berasal daerah itu.

Etnisitas semakin menguat dan memperoleh tempatnya dalam dinamika politik Kalimantan Barat seiring dengan penerapan sistem desentralisasi di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya etnisitas telah mengalami proses manipulasi oleh elit dan dijadikan instrumen perjuangan politik dan budaya untuk memperebutkan kekuasaan. Di Kalimantan Barat yang masyarakatnya masih kuat semangat primordialismenya, identitas etnis menjadi daya tawar yang menarik.

Menguatnya identitas Dayak dan upaya hegemoni semakin besar semenjak era reformasi/otonomi daerah, dipengaruhi tiga kekuatan dominan yaitu agama, suku dan adat. Tiga kekuatan etnisitas tersebut telah menjadi semacam tiang penyangga “nasionalisme etnik”. Tiga pilar kekuatan tersebut menempel pada elit etnik.

Dalam bagian lain, kemunculan politik identitas dan hegemoni, tidak bisa dilepaskan dari adanya intervensi globalisasi. Faktor ini tidak bisa nisbikan perannya, terutama karena globalisasi menyediakan ruang keterbukaan untuk saling berkomunikasi bagi tiga pihak yaitu komunitas global, *nation state*, dan warga lokal. Dalam situasi sekarang dimana sedang terjadi arena persaingan antar ideologi dengan berbagai warna- juga soal ekonomi diberbagai tingkatan, maka konstruksi identitas tidak kosong dari pengaruh satu sama lain. Terkait dengan soal ini, maka politik identitas berbasis etnis dan agama di komunitas

lokal, juga bisa dipahami sebagai konsekuensi dari persaingan di ranah global. Kehadirannya juga banyak didukung oleh posisi nasionalisme yang sedang lemah, baik dalam arti politik maupun ekonomi.

Pada akhirnya menguatnya politik identitas ini apabila berlangsung tanpa semangat nasionalisme keindonesiaan akan berdampak terhadap terbentuknya "nasionalisme etnik" dalam arti yang sesungguhnya. Budaya semacam itu, selain bertentangan dengan demokrasi, juga memberi pengaruh yang negatif dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan demokrasi. Ia telah menjelma menjadi *patron-client* karena keturunan, keluarga, kerabat, suku, golongan, kampung dan sebagainya. Max Weber menjelaskan klasifikasi masyarakat seperti itu adalah sebagai: "*domination into traditional authority*". Dalam manifestasinya di kalangan pemerintahan, kemudian menjelma dalam bentuk nepotisme, kolusi dan korupsi.

KESIMPULAN

"Negara etnik" di Kalimantan Barat berangkat dari semangat untuk menunjukkan eksistensi kultural yang tinggi dengan dukungan momentum politik pada era otonomi daerah. Roh primordial seakan memperoleh arena bermain pada era ini. Segregasi etnik berdasarkan agama telah memunculkan peta etnik kedalam dua kutub. Penduduk asli yang beragama Islam disebut Melayu dan yang bukan beragama Islam disebut Dayak. Keduanya telah terjebak dalam pusaran persaingan dalam berbagai hal. Persaingan keduanya memantik konflik kekerasan yang melibatkan etnik lain yang memiliki kedekatan sosio-kultural dengan mereka, yaitu Madura dan Tionghoa.

Etnik Dayak yang selama ini selalu disederhanakan dalam satu etnik, pada saat ini menunjukkan jatidiri yang sesungguhnya. Masing-masing telah memamerkan jatidiri kulturalnya dan juga basis politiknya. Mereka merasa satu etnik hanya karena mengalami perlakuan marginalisasi dan diskriminasi yang sama. Ketika marginalisasi dan diskriminasi tidak ada lagi, akhirnya mereka muncul berbeda. Saat ini kata seperti Selako, Kanayatn, Bekati, Iban, Kayan, Ribun, Mualang, Kantu, Keriau, Pesaguan dan Keninjal mewarnai kata Dayak. Dulu kata-kata tersebut tenggelam.

"Negara etnik" terjadi karena trauma hegemoni etnik yang dalam yang

kemudian mewarnai politik lokal. Setiap rezim yang berkuasa cenderung mempertontonkan hegemoni tersebut. Etnik Dayak yang identik dengan penduduk pedalaman dan mewarisi budaya "titisan leluhur" selalu dikorbankan sebagai aktor konflik hanya karena nenek moyang mereka dahulu melakukan "pengayauan". Identitas ini sedemikian rupa dilestarikan sebagai bagian dari proyek pembiaran konflik kekerasan. Identitas ini dipertontonkan menjelang dan sesudah pesta demokrasi dalam bentuk konflik kekerasan.

Politik lokal di Kalimantan Barat kental bermuatan persaingan dua kutub etnik yaitu etnik Dayak dan etnik Melayu. Keadaan persaingan ini menjadi lebih terbuka ketika pemilihan kepala daerah secara langsung. Persaingan ini terjadi karena trauma sejarah. Sejarah Kalimantan Barat mencatat bahwa elit etnik yang berkuasa menjalankan hegemoni etnik atas etnik lain. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa konflik kekerasan etnik yang berlangsung selama ini memiliki hubungan dengan upaya perlawanan hegemoni etnik tersebut.

PUSATAKA ACUAN

- Aditjondro, George Junus. 2001. *Cermin Retak Indonesia*. Yogyakarta: Cermin.
- Amirrachman, Alpha (ed.). 2007. *Revitalisasi Kearifan Lokal, Study Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. International Center for Islam and Pluralism. Jakarta: ICIP.
- Anyang, Thambun Y.C. 1998. *Kebudayaan dan Perubahan Daya Taman Kalimantan dalam Arus Modernisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Barat (BPS). 2003. *Kalimantan Barat dalam Angka 2002*. Pontianak: BPS Kalbar.
- Baharudin, Shamsul Amri. 2000. "Pembentukan identiti sebagai fenomena sosial: Suatu komentar konseptual dan empirical". Dalam Yusriadi & Moh. Haitami Salim (Ed.). 2002. *Islam di Kalimantan Barat*, hlm. 13-34. Prosiding kollokium Dayak Islam di Kalimantan Barat.
- Baharudin, Shamsul Amri. 2000. "Ilmu kolonial" dan pembinaan "Fakta" mengenai Malaysia. Dalam Rahimah Abd Aziz & Mohamed Yusof (Ed.). 2000. *Budaya dan Perubahan*, hlm. 56-71. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Baharudin, Shamsul Amri. 2001. Identiti dan etnisiti, tinjauan teoritis. Dalam Yusriadi

- & Haitami salim (Ed.). *Proseding Koloqium Dayak Islam di Kalimantan Barat*, hlm. 11-30. Pontianak: STAIN Pontianak-FUI-MABM.
- Baharudin, Shamsul Amri. 2007. *Modul Hubungan Etnik*. Shah Alam: Universiti Teknologi Mara.
- Collins, James.T. 2005. *Bahasa Melayu Bahasa Dunia, Sejarah Singkat*. Jakarta: Obor.
- Collins, James.T. & Awang Sariyan. 2006. *Borneo and the Homeland of the Malays*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Coomans, Mikhail. 1987. *Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- Davidson, Jamie Seith. *From Rebellion to Riots, Collective Violence on Indonesian Borneo*. Singapore: Nus Press.
- Djayadi, Muhamad Iqbal. 2003. "Kekerasan etnik dan perdamaian etnik:dinamika relasi sosial di antara Dayak, Melayu, Cina & Madura di Kalimantan Barat". Paper yang dipresentasikan untuk Reading Group LIPI Jakarta, 20 Januari: www.communalconflict.com
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selection from the Prison Notebooks*. London: Lawrence & Wishart.
- Hulten, Herman Josef. 1992. *Hidupku di Antara Suku Daya*. Jakarta: Gramedia.
- Kristianus Atok. 2009. *Orang Dayak dan Madura di Sebangki*. Pontianak: YPB-Cordaid.
- Marko Mahin. 2007. Damai dan adil di Tanah Dayak, Refleksi 111 Tahun rapat Perdamaian Para Pengayau. www.dayak21.org
- Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LkiS.
- Rahimah Abdul Aziz & Mohamed Yusoff Ismail. 2000. *Masyarakat, Budaya Dan Perubahan*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Sellato, Bernard. 1989. *Nomads of the Borneo Rainforest*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Sellato, Bernard. 2002. *Innermost Borneo, Studies in Dayak Culture*. Singapore: Singapore University Press.
- Siahaan, Harlem. 1989. *Pembauran di Kalimantan Barat Prospek dan Perspektif Sejarahnya*. Dalam buku Interaksi antar suku bangsa dalam masyarakat majemuk. Jakarta: Depdikbud.
- Suni, Bakran 2007. *Sejarah Melayu Sambas*. Pontianak: Lembaga Penelitian

Universitas Tanjungpura.

Suni, Bakran. 2010. *Demokrasi dan Budaya Politik: Suatu Kajian Pemilihan Kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat*. Bangi: Tesis PhD, UKM-ATMA.

Tambunan, Edwin Martua Bangun. 2004. *Nasionalisme etnik Kashmir dan Quebec*. Semarang: Indra Pustaka Utama.

Yusoff, Ismail. 2004. *Politik dan Agama di Sabah*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.